PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Rabu Tanggal: 24 Januari 2018 Halaman: 2

Perdin di Akhir Pembahasan

JOGJA - Banyaknya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) luncuran dalam Program Pembentukan Peratutan Daerah (Propemperda) 2018 membuat Pimpinan DPRD Kota Jogja memberlakukan aturan baru.

Perjalanan dinas (perdin) yang dilakukan tiap panitia khusus (Pansus) di DPRD Kota Jogja dijadwalkan tidak pada awal pembahasan.

"Kebijakan pimpinan DPRD, perjalanan dinas dilakukan di akhir bukan di awal, selesaikan dulu rapat-rapat pembahasan di Pansus," ujar Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko belum lama ini (22/1).

Dalam setiap pembahasan Raperda di Pansus, tiap anggota memiliki hak perjalanan dinas dua kali, yaitu sekali untuk konsultasi dan sekali untuk kunjungan mencari referensi.

Menurut Koko, sapaan Sujanarko, pada 2017 lalu banyak perjalanan dinas yang dijadwalkan di awal pembahasan. Tapi ternyata utang Raperda 2017 yang masuk Propemperda 2018 ini mencapai 15.

Total tahun ini Propemperda DPRD Kota Jogja mencapai 31 Raperda, ditambah 16 Raperda baru.

Aturan baru tersebut hanya berlaku untuk Raperda baru, karena Raperda luncuran tahun lalu sudah tidak mendapat fasilitas, termasuk perjalanan dinas.

"Setelah kewajiban merampungkan Raperda terpenuhi, para anggota bisa mendapatkan haknya (perjalanan dinas)," tutur Koko.

Aturan baru lainnya yang masih akan dikonsultasikan dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Jogja terkait dengan waktu pembahasan di Pansus. Politikus PDIP itu mengusulkan dibatasi maksimal dua bulan.

> **Kebijakan pimpinan DPRD, perjalanan dinas dilakukan di akhir bukan di awal, selesaikan dulu rapat-rapat pembahasan di Pansus."**
>
> **SUJANARKO**
> *Ketua DPRD Kota Jogja*

Hal itu juga mempertimbangkan tahun ini yang sudah masuk tahun politik.

"Sebelum disibukkan agenda politik, anggota harus menyelesaikan tanggung jawab pembahasan Raperda, makanya waktu diusulkan dibatasi," ujarnya.

Tapi, aturan batasan waktu tersebut sepertinya sulit direalisasikan, termasuk untuk Raperda luncuran, seperti Raperda Penyandang Disabilitas DPRD Kota Jogja. Menurut Ketua Pansusnya, Muhammad Fauzan, pembahasan Raperda yang dimulai lagi dari awal saat ini terhenti.

Hal itu karena Komite Disabilitas yang diajak melakukan pembahasan masih disibukkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. "Sekarang pembahasan berhenti di bentuk Unit Pelayanan Disabilitas," ujarnya. **(pra/ila/er)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005